

ABSTRAK

Nama : Ayu Deviana, SH., LL.M.
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Keuangan Bank Indonesia Dari Perspektif Independensi
Halaman : 282 halaman

Keuangan Bank Indonesia yang sehat dan stabil memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Keuangan Bank Indonesia yang terdiri atas aset dan liabilitas merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial. Upaya menjaga kesehatan dan kekuatan keuangan Bank Indonesia tersebut salah satunya diwujudkan melalui perlindungan hukum atau imunitas terhadap keuangan Bank Indonesia dimana saat ini UU Bank Indonesia dan UU Perbendaharaan Negara menjadi dasar hukum perlindungan hukum terhadap keuangan Bank Indonesia. Dalam disertasi ini dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap keuangan Bank Indonesia dalam UU Bank Indonesia dan UU Perbendaharaan Negara serta ketentuan terkait. Selanjutnya bagaimana implementasi dari pengaturan dimaksud dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap keuangan Bank Indonesia. Selain itu, bagaimana pengaturan yang ideal untuk perlindungan hukum terhadap keuangan Bank Indonesia dari perspektif independensi. Pengkajian beberapa permasalahan dimaksud menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan data sekunder. Berdasarkan hasil pengkajian, perlindungan hukum terhadap Keuangan Bank Indonesia dalam UU Bank Indonesia dan UU Perbendaharaan Negara dirasakan belum memadai. Ketentuan perlindungan hukum dalam UU Bank Indonesia belum mengatur perlindungan hukum bagi institusi Bank Indonesia. Perlindungan hukum dalam UU Perbendaharaan Negara tidak sejalan dengan prinsip independensi Bank Indonesia terutama independensi keuangan, dimana Bank Indonesia memiliki kewenangan mengelola kekayaan sendiri terlepas dari APBN. Materi dalam UU Perbendaharaan Negara dan peraturan pelaksanaannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU Keuangan Negara yang memfokuskan pada tata kelola pelaksanaan Keuangan Negara dalam APBN dan APBD, termasuk pengaturan perlindungan hukum terhadap aset negara milik Pemerintah berupa BMN dan BMD. UU Perbendaharaan Negara juga belum mengatur perlindungan hukum terhadap liabilitas Bank Indonesia, yang juga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia. Pengaturan perlindungan hukum terhadap keuangan Bank Indonesia seharusnya diatur dalam suatu Undang-Undang karena memuat materi pemberian imunitas. Selain itu agar sejalan dengan prinsip independensi Bank Indonesia, pengaturan perlindungan hukum dimaksud juga perlu diatur dalam Undang-Undang organik Bank Indonesia atau Undang-Undang lain yang di dalamnya juga mengatur mengenai kelembagaan Bank Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Bank Indonesia, Keuangan, Aset, Liabilitas, Independensi.

ABSTRACT

Name : Ayu Deviana, SH., LL.M.
Title : Legal Protection for Central Bank of Indonesia's Finances From An Independent Perspective
Page : 282 pages

Bank Indonesia's sound and stable finances play an important role in supporting the Bank Indonesia's duties as the central bank. Bank Indonesia's finances, which consist of assets and liabilities, are the main instruments in implementing Bank Indonesia's policies in the monetary, payment system and macroprudential sectors. One of the efforts to maintain the health and soundness of Bank Indonesia's finances is through the legal protection or immunity to Bank Indonesia's finances. Currently the Bank Indonesia Law and the State Treasury Act are the legal basis for legal protection of Bank Indonesia's finances. In this dissertation, further studies are conducted on the legal protection arrangements for Bank Indonesia finances in the Bank Indonesia Law and the State Treasury Law and related provisions. Furthermore, the studies are conducted to know the implementation of the regulation referred to in order to provide legal protection to Bank Indonesia's finances. In addition, what is the ideal regulation arrangement for legal protection of Bank Indonesia's finances from an independence perspective. The study for these problems uses a normative legal research methodology with secondary data. Based on the results of the study, the legal protection of Bank Indonesia's finances in the Bank Indonesia Law and the State Treasury Law is deemed inadequate. The provisions for legal protection in the Bank Indonesia Law do not yet regulate legal protection for Bank Indonesia institutions. The legal protection in the State Treasury Law is not in line with the principle of independence of Bank Indonesia, especially financial independence, where Bank Indonesia has the authority to manage its own assets apart from the State Budget. The regulation substance in the State Treasury Law and its implementing regulations are the implementing regulation of the State Finance Law which focuses on the governance of the State Finance in the APBN and APBD, including the regulation of legal protection of state assets owned by the Government in the form of BMN and BMD. The State Treasury Law also does not stipulate legal protection for Bank Indonesia's liabilities, which is also an important instrument in supporting Bank Indonesia's policies. The regulation of legal protection for Bank Indonesia's finances should be regulated in the level of law or act since it stipulates immunity for Bank Indonesia. In addition, to be in line with the principle of independence of Bank Indonesia, the regulation of legal protection should also needs to be regulated in the organic Law of Bank Indonesia or other laws which also regulate the institutions of Bank Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Bank Indonesia, Finance, Assets, Liabilities, Independency.